



KPK Atensi Dua Proyek Strategis Sulsel

KPK Atensi Dua Proyek Strategis Sulsel

MAKASSAR, FAJAR—Komi-
si Pemberantasan Korupsi
(KPK) memberi atensi bagi
dua proyek strategis Pemprov
Sulsel tahun anggaran 2024.
Keduanya adalah proyek
jalan dan irigasi.

KPK hadir langsung di
Kantor Gubernur Sulsel
memberikan pendampingan

kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) teknis penye-
lenggara dua proyek terse-
but. Selain itu, tujuannya
untuk mengevaluasi pelak-
sanaan e-katalog Pemprov
Sulsel.

Direktur Koordinasi dan
Supervisi Wilayah IV KPK
RI, Edi Suryanto mengata-

kan, pihaknya sedang dalam
pendalaman delapan proyek
strategis Pemprov Sulsel.
Enam proyek jalan dan dua
proyek irigasi.

Namun, ada dua proyek
yang secara khusus menjadi
atensi KPK. Ialah proyek

👉 Baca KPK... Hlm 11

KPK Atensi Dua Proyek Strategis Sulsel

👉 Lanjutan Halaman... 9

irigasi di Wajo dan rekon-
struksi Jl Ussu-Nuha di
Luwu Timur. Sebab, kedu-
anya mengalami keter-
lambatan dalam progres
pengerjaan. "Kita lihat di
mana potensi masalah-
nya. Inspektorat harus
mengaudit investigasi jika
ditemukan ada masalah
di tahapannya," ujar Edi,
Kamis, 19 September.

Secara umum, kata
Edi, KPK hendak mencari
tahu potensi terjadinya
tindak pidana korupsi di
seluruh tahapan proyek
strategis tersebut. Mulai
dari perencanaan, pem-
ilihan rekanan, penentuan
harga, hingga progres
pelaksanaan sampai
penyelesaian.

"Kami fokus mence-
gah terjadinya tindak
pidana korupsi. Kami
mendalami bagaimana
proses perencanaannya,

penentuan harganya,
pemilihan vendornya. Itu
kami dalam upaya kami
pastikan sudah ada upaya
mencegah sehingga tidak
sampai terjadi korupsi,"
beber Edi.

Selanjutnya, terkait
kebijakan penggunaan
e-katalog dalam pelaksa-
naan proyek strategis di
Sulsel. Diketahui, sejak
2023, secara keseluruhan
proyek Pemprov Sulsel
telah menggunakan meto-
de e-katalog.

Secara aturan, menurut-
nya, sudah benar. Namun,
implementasinya perlu dite-
lusuuri. Ia tidak menepis
bahwa dalam e-katalog
potensi menunjuk rekanan
serupa dalam beberapa
proyek berbeda bisa terja-
di. Sehingga, ia meminta
Inspektorat Sulsel untuk
mengaudit hal itu.

"Kita akan melihat
janga-jangan nge-kliknya
salah, temannya semua,

mungkin ya, ataukenal-
annya semua," tukas Edi.

Kepala Inspektorat
Sulsel, Marwan Mansyur
menjelaskan, pendam-
pingan KPK ini merupakan
rutinitas dalam pelaksa-
naan Monitoring Center of
Prevention (MCP). Tuju-
annya, untuk memastikan
tidak ada proyek pemerin-
tah provinsi yang terdapat
aktivitas korupsi. Diharap-
kan, agar proyek itu jadi
acuan kelengkapan terma-
suk teknis pelaksanaan,
dan semuanya berjalan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

"Misalnya dalam peng-
adaannya, pemilihan
penyedia, pelaksanaan,
progres pengerjaan, apa
kendalanya, kemungkinan
selesai atau tidak selesai.
Akan diberikan rekomen-
dasi dari hasil rapat evalu-
asi," papar Marwan.

Delapan proyek strate-
gis tersebut telah dipilih

sejak awal tahun seba-
gai referensi dan bahan
evaluasi. Namun, ada dua
yang diperintahkan lang-
sung KPK untuk pihaknya
mengecek secara lang-
sung ke lapangan sebagai
bahan second opinion.

"Ada dua yang dikritisi,
karena progresnya terlam-
bat sehingga kami diminta
mengecek. Salah satunya
irigasi di Wajo karena banjir.
Pelaksanaan pengerjaan-
nya agak molor. Tapi Dinas
SDA masih optimis tepat
waktu, tetapi kami akan
melihat betulkah bisa,
dengantujuan agar menca-
ri solusi," ulasnya.

Marwan juga menje-
laskan, bahwa OPD teknis
bersama Biro Pengadaan
Barang dan Jasa ke depan-
nya diharapkan lebih teliti
dalam penunjukan rekan-
an. Secara umum KPK
akan meninjau pelaksa-
naan e-katalog," kuncinya.
(uca/yuk)